

Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Agus Arwani
IAIN Pekalongan
Email: agus.arwani@stain-pekalongan.ac.id

Abstract

Accountants are the actors who contribute to the establishment and implementation of accounting as a structure. On the other hand the consequences of the application of modern accounting shows the impact of a less than satisfactory. Facts show the number of accounting manipulation scandal that hit the company's financial statements and the low awareness of their social responsibility and the environment implies that very large changes in accounting principals. Accounting reality is part of how accountants take on the role. Deviations reality always brings accountants as party central is how actors and structures form mutually met. Habitus actor "greedy" met with accounting (capitalism) as a structure that legitimize it. In reality accountant (agent) looks so lost in the shackles of capitalism, so the agency theory in the form of a conflict of interest, it seems to shift the basis of mutual symbiosis between the interests of management and accountants. Accountants must be returned khittah her as a sovereign profession, he is an ideologue as Rausyan Fikr. All forms of deep-an accountant in worship, glorify the "number" in the sense of making all tasks as tasks (treatises) "prophetic" to map the right stakeholders fairly and correctly. This can only take place within the awareness frame of the Godhead (fervently) to put God at the summit toward accountability. Readiness accountant sharia in entering the MEA in 2016 with preparing the capabilities and expertise of sharia-based accounting standards IFRS, Accounting Sharia must understand the risks of sharia, sharia accounting should be standardized SDI International, science and technology capabilities accountant sharia be reliable.

Keywords: Agency, Akuntan Syari'ah, MEA

Abstrak

Akuntan adalah pihak aktor yang berperan terhadap pembentukan dan pelaksanaan akuntansi sebagai struktur. Realitas akuntansi merupakan bagian dari bagaimana akuntan mengambil peran. Pada sisi yang lain konsekuensi

dari penerapan akuntansi modern tersebut menunjukkan dampak yang kurang memuaskan. Fakta menunjukkan banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyiratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada para pelaku akuntansi. Realitas penyimpangan yang selalu menghadirkan akuntan sebagai pihak sentral adalah bentuk bagaimana aktor dan struktur bertemu secara mutual. Habitus aktor yang ‘serakah’ bertemu dengan akuntansi (kapitalisme) sebagai struktur yang melegitimasi. Dalam realitasnya akuntan (agen) terlihat begitu tenggelam dalam belenggu kapitalisme, sehingga teori agency berupa konflik kepentingan, kelihatannya bergeser dengan bersimbiosis secara mutual antara kepentingan manajemen dan akuntan. Akuntan harus dikembalikan khittah-nya sebagai profesi yang berdaulat, ia adalah ideolog sebagai Rausyan Fikr. Bentuk ke-khusuk-an akuntan dalam beribadah, bertasbih dengan ‘angka’ dalam artian menjadikan segenap tugas sebagai tugas-tugas (risalah) ‘kenabian’ untuk memetakan hak para stakeholders dengan adil dan benar. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam bingkai keberdaulatan dan membangkitkan kesadaran Ketuhanan (khusus) dengan menempatkan Tuhan sebagai arah puncak pertanggung jawaban. Kesiapan akuntan syariah dalam memasuki MEA pada 2016 dengan mempersiapkan kemampuan dan keahlian dari standar akuntansi berbasis syariah IFRS, Akuntansi Syariah harus memahami risiko syariah, akuntansi syariah harus distandardisasi SDI Internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi kemampuan akuntan syariah dapat diandalkan.

Kata kunci: Agency, Akuntan Syari’ah, MEA

Pendahuluan

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi,

faktor budaya dan faktor daya modal. Lalu kita dapat melihat bagaimana kelima faktor tersebut sudah secara maksimal dikelola, faktanya ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang masih terbelakang dalam pengelolaan beberapa faktor tersebut walaupun kita juga dapat melihat beberapa negara lainnya sudah cukup mampu mengelola dengan baik. Jika melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima faktor tersebut, beberapa faktor masih belum dapat dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan negara lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau Komunitas ASEAN 2015 dengan tujuan yang baik. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC).

Salah satu strategi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) tahun 2015 nanti adalah memperkuat posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya memperkuat posisi UMKM tersebut diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan standar produk, akses pembiayaan, kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM, akses dan transfer teknologi, serta akses informasi dan promosi di luar negeri. Dari kelima upaya tersebut, berdasarkan survei Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan bahwa kendala yang masih mendominasi UMKM di Indonesia adalah masalah pembiayaan yaitu lemahnya akses kepada sumber pendanaan, hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang mampu diberikan oleh UMKM kepada pihak eksternal sebagai sarana pengaman kreditur dari UMKM, seperti laporan keuangan. Berbagai pendana berharap adanya Laporan Keuangan (LK) UMKM sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dananya, sementara bagi UMKM, Laporan Keuangan adalah kemewahan yang tak terjangkau. Berbagai macam keterbatasan yang dihadapi UMKM dalam menyediakan LK diantaranya karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Pada sisi yang lain konsekuensi dari penerapan akuntansi modern tersebut menunjukkan dampak yang kurang memuaskan. Fakta menunjukkan banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyiratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada para pelaku akuntansi. (Triuwono, 2006: 5).

Akuntansi modern mengabaikan dua aspek penting yaitu lingkungan dan sosial sehingga gagal menggambarkan realitas bisnis yang semakin kompleks; Sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi modern sehingga terefleksi ke dalam bentuk *private costs/benefits* dan berorientasi melaporkan profit untuk kepentingan pemilik modal/pemegang saham. Oleh karena itu informasi akuntansi menjadi egois dan mengabaikan pihak lain.

Oleh karena itu bisa kita pahami bahwa ketika akuntansi modern mampu menghadirkan realitas sosial dengan semangat kapitalismenya maka yang terjadi adalah praktek-praktek akuntansi yang bebas dari nilai-nilai lokalitas masyarakat (*value free*) sehingga realitas sosial tersebut menjadi parsial (tidak utuh). Kondisi ini juga menyiratkan penerapan hukum universal dalam ekonomi mainstream (termasuk akuntansi) memiliki potensi kuat untuk memberangus nilai-nilai local (*local wisdom*) yang berlaku dalam masyarakat (Muhammad, 2008: 9). Di sisi yang lain, adanya sifat yang parsial ini melahirkan budaya masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai etika, moralitas dan keberagaman sosial maupun spiritualitas keagamaan. Hal ini ditegaskan oleh Triuwono bahwa akuntansi modern hanya *concern* dengan dunia materi dan sebaliknya mengabaikan dan mengeliminasi dunia non-materi (spiritual) (Triuwono, 2006: 15). Dengan demikian patut diyakini bahwa mengembangkan akuntansi ditinjau dari perspektif sosio historisnya perlu memasukkan aspek *value* untuk menciptakan wajah akuntansi yang sarat dengan nilai (*value laden*). Akuntansi yang bernilai diharapkan mampu menjadikan praktek akuntansi yang mendorong perilaku manusia lebih beragama, bernilai spiritualitas dan beretika dalam kehidupan sosial dan lingkungannya.

Profesi akuntan dengan variasi pekerjaannya (termasuk akuntan intern, staf akuntansi dan bidang lain sepanjang masih berhubungan dengan kegiatan akuntansi) mengalami tekanan baik fisik maupun mental yang tidak

ringan dalam dunia kerjanya. Stereotip pekerjaan yang monoton, berulang-ulang dan cenderung membosankan serta atribut lainnya mendorong rasa frustrasi dan kegelisahan dalam bekerja (Krishnakumar, S., and C. P. Neck, 2002: 153-164). Hal ini juga dapat berdampak pada perilaku negatif seorang akuntan yang mempengaruhi nama baik profesi di mata masyarakat atau publik. Salah satu asumsi yang dijadikan sebagai penyebab dari perilaku negatif seorang akuntan adalah hilangnya atau berkurangnya nilai-nilai spiritualitas keagamaan dalam dirinya. Hilangnya nilai-nilai spiritualitas keagamaan ini mengakibatkan seorang akuntan tidak dapat lagi membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, serta beretika atau melanggar etika (Sulistiyo, 2004: 15). Oleh karena itu menjadi penting membahas konsep spiritualitas keagamaan dalam dunia akuntan. Penulis berpikir kondisi dunia kerja secara umum berlaku juga secara khusus di dunia kerja akuntan baik akuntan konvensional maupun akuntan syariah.

Sebelum merebaknya lembaga bisnis syariah akibat tuntutan pasar, akademisi akuntansi menganggap bahwa akuntansi adalah seni pencatatan yang bebas nilai. Bebas nilai berarti bahwa akuntansi berfungsi sebagai alat, yaitu alat pencatatan. Akuntansi tidak ubahnya seperti pisau yang merupakan benda yang bebas nilai dan tergantung keinginan penggunanya, ingin digunakan untuk keperluan dapur atau untuk melukai anggota keluarga adalah pilihan sang pengguna sesuai tujuannya. Namun tidak begitu dengan benda-benda lain yang nilainya tidak bebas, seperti halnya kayu salib, peci haji, jilbab, busana pastur, busana biksu dan lain sebagainya, yang pengguna benda-benda tersebut akan identik dengan nuansa benda yang digunakannya dengan apapun tujuannya, yang artinya benda-benda tersebut tidak bebas nilai karena kesanggupannya merubah aura penggunanya.

Perkembangan teori yang selama ini hanya dipandang secara evolutif dalam mencapai suatu struktur yang mapan tidak selamanya berkembang sebagaimana awalnya. Khun yang memperkenalkan istilah ‘‘paradigma ‘‘ menciptakan sebuah cara pandang yang revolutif dalam melihat dinamika ilmu pengetahuan (Muslih, 2004: 68). Dinamika ilmu pengetahuan tidak harus bergerak secara linear, pergeseran paradigma sebagai sudut pandang manusia dalam memahami realitas, telah ikut menggeser cara pandang dalam melihat akuntansi sebagai realitas disiplin ilmu.

Ironisnya ketika akuntansi sebagai disiplin ilmu yang merupakan produk sejarah, justru berperan sebagai *ancilia power* (budak kekuasaan) dalam melanggengkan kekuasaan menindas dengan memposisikan diri sebagai ‘pelayan’ atas kepentingan kelas tertentu yakni kelas penguasa secara ekonomik. Pada struktur masyarakat feodal (*pra kapitalism*), akuntansi tidak ubahnya menjadi alat kaum feodal dalam mengkalkulasi kepentingan tanah para bangsawan. Diera kapitalisme, ternyata peran akuntansi tidak berubah, justru bergeser menjadi doktrin hegemoni dalam melanggengkan kekuasaan pemodal (borjuis). Berdasarkan latar belakang memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana kesiapan akuntan syariah Indonesia dalam memasuki gerbang MEA?

Pembahasan

Tarik menarik kuasa antara aktor (akuntan) dan struktur (akuntansi), meskipun kadang pula bertemu secara mutual. Realitas penyimpangan yang selalu menghadirkan akuntan sebagai pihak sentral adalah bentuk bagaimana aktor dan struktur bertemu secara mutual. Habitus aktor yang ‘serakah’ bertemu dengan akuntansi (kapitalisme) sebagai struktur yang melegitimasi-nya. Akuntansi berfungsi sebagai struktur ketika kandungan filosofisnya adalah kapitalisme maka akuntan sebagai agen dan keseluruhan agen yang bertindak dalam pengambilan keputusan akan terpola pada pola-pola kapitalisme pula. Sehingga realitas yang dikonstruksi oleh struktur (akuntansi) adalah realitas kapitalisme.

Begitupun halnya agen tidaklah selamanya menjadi objek yang terdikte oleh struktur disebabkan ia memiliki kuasa untuk menolak struktur, hal ini merepresentasikan kedaulatan agen. Dalam artian akuntansi yang dipersepsi (ditafsirkan) secara materil maka tindakanpun akan mengarah pada bagaimana mengakumulasi materi. Begitupun ketika akuntansi dipersepsi dalam kerangka tauhid (pembebasan), maka realitas akuntansi akan menciptakan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembebasan (tauhid) sebagai puncak pencapaian nilai. Akuntansi dalam posisi ini dibentuk (dikonstruksi) oleh agen dalam kerangka nilai sosial, akan kembali mempengaruhi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Problem keprofesian akuntan dalam memasuki gerbang MEA

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa minat penghuni jurusan akuntansi kebanyakan menganggap bahwa akuntan merupakan profesi yang paling menjanjikan. Tingginya minat pada kenyataannya bertemu dengan "hausnya" pemodal akan bagaimana mengakumulasi kekayaan di tengah pusaran kompetisi yang dahsyat. Maka yang terjadi bukan tarik menarik kepentingan (*interest conflict*) antara *agent* dan *principall (agency theory)*, melainkan bertemu dalam bentuk asosiasi (*mutualism*) untuk tujuan yang sama yakni memperbesar peradaban laba. Sehingga kode etikpun kadang tinggal selebaran kertas yang "usang" dan hanya dibicarakan di ruang-ruang yang sempit bernama kampus.

Bahkan status sebagai profesi banyak yang mempertanyakan disebabkan karena pada praktiknya muatan otonomisasi akuntan tidak terlihat, lebih banyak dipasung dan dikendalikan oleh kepentingan (Harahap, 2007: 5). Dalam entitas bisnis banyak anggapan yang menganggap bahwa seolah-olah ketika akuntan telah dibayar sewa jasa maka ia mempersepsikan dapat mendiktenya sesuai kepentingan manajemen (Lidigdo, 2007: 5). Dorongan mata pencaharian mengalahkan dorongan sebagai profesi, maka yang terjadi adalah mencatat (*creative accounting*) sesuai kepentingan pemodal dan manajemen di samping juga kepentingan pribadi terpenuhi (Mulawarman, 2008), *earning management, windows dressing, lipstick accounting, income smoothing*, mereproduksi laporan yang distortif dan manipulatif baik dalam bentuk formal prosedur maupun *moral hazard*.

Praktik pengrusakan alam hingga berimbas pada masyarakat, fenomena "perampasan" hak buruh dan pekerja yang dilegitimasi lewat pengaturan-pengaturan akuntansi (penilaian dan pengukuran) adalah sebuah kezaliman akuntan (Muthahari, 2008: 274-276).

Hasil penelitian Wilmott dan Lowe (1989) serta Willmott (1990), Lee (1994) menjelaskan bahwa, berdasar peran profesionalnya, akuntan mengklaim dirinya sebagai representasi kepentingan publik, dengan menggunakan otoritas pengetahuannya, kenyataannya mereka bekerja untuk melayani kepentingan pribadi (*order*). Hal tersebut, sebenarnya juga telah diteliti oleh Bazerman, Morgan dan Loewenstein (1997) dalam Kumalasari dan Joesoef (2002), yang mengatakan bahwa akuntan publik tidaklah mungkin bertindak

independen dalam menjalankan tugas audit. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang disebut sebagai *self-serving bias* yang timbul dari interaksi berkesinambungan antara akuntan publik dan manajer di mana keduanya diuntungkan oleh adanya *self-serving bias* tersebut (Mulawarman, 2008: 5).

Ruh akuntan terletak pada ‘kepercayaan’, dalam artian ketika kepercayaan telah hilang maka seperti hilangnya ruh dalam jasad manusia yang bermakna kematian. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan publik dan kepercayaan *stakeholders* secara keseluruhan atas profesi akuntan. Ketika kepercayaan telah hilang akibat tergerus tanpa henti, maka akuntan tidak lagi dibutuhkan. Fakta menunjukkan betapa lonceng ‘kematian’ akuntan semakin nyaring terdengar. Kasus demi kasus penyimpangan hilir berganti yang selalu melibatkan akuntan (Lidigdo, 2007) baik terkait ekonomi maupun masuk dalam pusaran politik. Akuntan yang bergerak dalam ruang pemerintahan, di Indonesia seperti BPK. Tidak sedikit persoalan-persoalan muncul akibat terjeratnya akuntan dalam pusaran politik, yang kadang menciptakan distorsi pelaporan keuangan.

Di samping kualitas citra akuntan masuk dalam tataran elit, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan citra manajemen. Sehingga masyarakat mempersepsinya sebagai bagian dari manajemen, yang dalam konteks industri, akuntan sama dengan manajemen sebagai pihak yang dinisbahkan dalam konflik pertentangan majikan dan buruh yang begitu ironis atau kasus-kasus konflik korporasi dengan masyarakat yang sering melanda dan mengorbankan rakyat kecil. Kelihatannya akuntan menemukan dirinya terkulai dalam lumpur kekuasaan manajemen, sehingga tidak dapat mengambil tindakan-tindakan yang berkeadilan. Hasil penelitian Harahap (2007) mengungkapkan bagaimana penurunan kepercayaan cukup drastis hingga mempengaruhi minat terjadi di Amerika hingga mencapai 18%, Harahap menyebutnya sebagai krisis akuntansi (Harahap, 2007).

Dengan demikian sesungguhnya yang dibutuhkan Islam adalah ilmuwan-ilmuwan yang ideolog, Ilmuwan yang bergerak dalam dua arus antara idealita dan realita, antara individu dan sosial, antara vertikal dan horizontal, antara profesionalisme dan humanisme, antara misi kemanusiaan dan misi kenabian, antara kehidupan dunia dan akhirat (Syariati, 1984). Akuntansi adalah sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak

hanya ada di tempat ibadah, melainkan juga di tempat-tempat bisnis.

Laporan keuangan sebagai karya akuntan harus dipersepsi sebagai hasil dari integrasi kualitas intelektual dan spiritual. Akuntan sebagai utusan (membawa amanah) pemberi kabar (informasi) harus dimaknai dalam kerangka profetik, sebagaimana sifat "kenabian" yang diutus untuk memberi kabar kepada manusia tentang kebenaran, sebagaimana akuntansi adalah risalah dari Tuhan.

Langkah strategis dalam memasuki MEA

Pelaksanaan kesepakatan MEA sudah masuk pada tahun 2016. Indonesia harus mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman pelaksanaan *free trade agreement* (FTA) dengan China, akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan MEA 2015 ini. Beberapa langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ialah dari sektor usaha perlu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, memperbaiki kualitas produk dalam negeri dan memberikan label SNI bagi produk dalam negeri agar memiliki nilai ekspor sehingga mampu bersaing, mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka. Dalam sektor investasi, Indonesia dinilai akan menjadi negara yang lebih banyak diuntungkan karena diharapkan investasi asing mampu tumbuh pesat di Indonesia (Departemen Perdagangan, TT: 82)..

Dalam sektor tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi pekerja, meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Sektor infrastruktur perlu adanya perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, dan restrukturisasi industri. Selain itu, perlu adanya sosialisasi, pengarahan dan pelatihan kepada masyarakat luas mengenai adanya MEA 2015 sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapannya ketika era MEA 2015

datang. Kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam datangnya era MEA 2015 apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA 2015 untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak cukup produk yang disiapkan akan tetapi tenaga professional juga disiapkan diantaranya akuntan syariah karena dengan adanya MEA akan mendorong lembaga keuangan syariah Negara lain akan membuka cabang di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan tenaga akuntan syariah di Indonesia yang cukup banyak.

Kesiapan akuntan syariah indonesia dalam memasuki MEA

Masyarakat Ekonomi Syariah yang dimulai tahun 2015 menjadi tantangan tantangan tersendiri bagi pegiat industri ekonomi syariah lebih khusus lagi para akuntan syariah. Dengan usia yang bisa dianggap tidak lagi muda, sudah seharusnya industr ekonomi syariah siap memasuki pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada 2016. Perbankan syariah yang tahan terhadap terpaan krisis, khususnya pada 1998, telah menjadi modal kuat dalam menghadapi persaingan bebas di kawasan regional dan profesi akuntan syariah juga harus siap memasuki MEA karena sudah ditempa dengan perubahan PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 101 sd 109.

Tantangan ini bertambah karena belum lama ini Presiden Jokowi membeberkan peluang yang bisa diraih para investor dalam APEC CEO Summit di Baijing. Sudah tentu “undangan” Presiden ini menjadi sinyal bahwa Indonesia bakal “diserbu” banyak pihak mulai dari eksportir barang, jasa, pelaku bisnis hingga sumber daya manusia.

MEA harus dilihat sebagai peluang sehingga mereka yang terlibat aktif dalam perbankan dan jasa keuangan syariah semakin terpacu meningkatkan kualitas. Syarat untuk memenangkan persaingan ini dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara lain. Pemerintah sudah tentu berpihak pada warga negaranya. Upaya meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan merupakan keharusan.

Regulasi di Indonesia yang tidak berpihak pada sektor keuangan syariah mengakibatkan perbankan syariah kita masih kalah jika dibandingkan Malaysia. Ini dapat dilihat data respective Bank's Financial Reports pada 31 Desember 2012. Aset lima bank syariah besar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia kalah jauh dari perbankan Malaysia. Jika aset BSM 5,1 miliar dolar AS, maka itu kalah jauh dengan Maybank Islamic (Malaysia) yang memiliki aset 19,9 miliar dolar AS. Aset BSM bahkan masih kalah jika dibandingkan RHB Islamic (Malaysia) yang asetnya 8,4 miliar dolar AS, padahal bank ini menduduki posisi kelima, sementara BSM posisi pertama di Indonesia.

Mantan presiden SBY berani mempromosikan ekonomi syariah melalui Gerakan Ekonomi Syariah 17 November 2013. SBY bahkan menjadikan ekonomi syariah sebagai ekonomi nasional. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba mengingat dalam kurun lima tahun aset perbankan syariah meningkat 40% dibandingkan kenaikan perbankan konvensional yang hanya 16,6%. Perbankan syariah jauh lebih unggul.

Keunggulan industri keuangan syariah ini sebenarnya tidak hanya perbankan. Berdasarkan data yang dirilis *Global Islamic Finance Reports* 2011, terjadi peningkatan persentase di beberapa sector keuangan syariah Indonesia. Diantaranya adalah aset perbankan Islam, SDM perbankan Islam, sukuk negara, corporate sukuk, Islamic Mutual Funds, dan asuransi syariah. Telah tercatat Indonesia menduduki posisi keempat dalam percepatan pertumbuhan keuangan syariah global. Indonesia berada dibawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi. Dengan pertumbuhan diatas, maka akan membutuhkan setidaknya 20 ribu professional di industri ekonomi syariah.

Banyak kalangan yang merasa ragu dengan kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam kekhawatiran mengenai terhantamnya sektor-sektor usaha dalam negeri kita, jika kita mengingat bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan China. Kini China mampu menguasai pasar domestik kita yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas Indonesia.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan produk dalam negeri oleh pemerintah, namun hal terpenting yang sebaiknya dilakukan

adalah meningkatkan daya saing Indonesia. Berdasarkan fakta peringkat daya saing Indonesia periode 2012-2013 berada diposisi 50 dari 144 negara, masih berada dibawah Singapura yang diposisi kedua, Malaysia diposisi ke dua puluh lima, Brunei diposisi dua puluh delapan, dan Thailand diposisi tiga puluh delapan. Melihat kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang menjadi faktor rendahnya daya saing Indonesia menurut kajian Kementerian Perindustrian RI yaitu kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja. Jika kita menilai terlihat industri Indonesia masih belum siap untuk memasuki MEA 2016 karena masih banyaknya masalah yang belum menemui titik terang seperti lemahnya terhadap pengawasan produk-produk impor, penyelundupan, isu keamanan yang mengganggu investasi, serta mahalnya tarif terminal handling charge (Tim, 2008: 15).

Beberapa cabang industri lain Indonesia masih lebih unggul dari negara tetangga akan tetapi pada sektor industri jasa Indonesia dianggap sama sekali tidak memiliki keunggulan. Tantangan lain dalam sektor industri adalah mengenai upah minimum, kepastian hukum, biaya transportasi barang terlampau mahal. Kekhawatiran lain juga terjadi akibat lemahnya daya saing sumber daya manusia bangsa, hal ini tercermin dalam rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Berdasarkan fakta yang dirilis Human Development Index Indonesia masih berada di posisi 121 dari 185 negara, itu artinya masih perlu pembenahan dalam memaksimalkan daya saing SDM di Indonesia melalui kesempatan pendidikan, dan kesehatan. Masalah yang kita lihat mengenai kualitas SDM sebenarnya hanyalah salah satu masalah mendasar yang dialami Indonesia. Tanpa SDM yang berkualitas rakyat didaerah tidak mampu mengolah kekayaan alam yang berlimpah menjadi produk yang bernilai ekspor. Peningkatan SDM yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia ini tak kunjung usai. Memasuki MEA 2016 telah datang, kita mesti sadar bahwa semua ini menuntut kita untuk bisa meningkatkan kualitas SDM jika tidak jangan berharap bahwa masuk MEA tahun 2016 menjadi peluang besar, bisa jadi akan menimbulkan masalah yang sama tapi lebih besar.

Setelah memasuki MEA 2016, bangsa Indonesia sebaiknya berbenah untuk memperbaiki kualitas SDM melalui mutu pendidikan yang merata tanpa kesenjangan sehingga kita akan percaya diri untuk bersaing dengan

bangsa lain. Selain dua hal tersebut kekhawatiran lain muncul dari segi infrastruktur, menurut data kementerian keuangan anggaran infrastruktur tahun ini mencapai 206 triliun rupiah atau naik dibanding tahun lalu, namun rasionya masih dibawah 2% dari PDB meskipun setiap tahun anggaran infrastruktur mengalami kenaikan tetap belum signifikan untuk meningkatkan pembangunan.

Minimnya anggaran infrastruktur dan masalah regulasi yang kurang jelas membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Padahal apabila ada kejelasan regulasi akan ada investor yang menanamkan modalnya. Kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia sudah tidak mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi padahal Indonesia telah memasuki era MEA pada tahun 2016 di mana semua ini menuntut adanya infrastruktur yang memadai untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi. Yang paling krusial adalah membenahi infrastruktur serta biaya logistik, saat ini Indonesia biayanya mencapai 16% dari total biaya produksi padahal normalnya hanya berkisar 9-10%.

Strategi akuntan syariah indonesia memasuki MEA tahun 2016

Akuntansi merupakan *an everchanging discipline*, berubah terus mengikuti perkembangan zaman. Akuntansi pada masa lalu sangat berbeda dengan akuntansi pada masa sekarang. Terbukti dengan berkembangnya kajian baru dalam disiplin ini seperti *social and environmental accounting* yaitu munculnya cabang-cabang baru dari akuntansi tidak terlepas dari perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Saat ini akuntansi yang kita kenal hanya *concern* dengan dunia materi, mengabaikan dan mengeliminasi dunia non-materi. Manusia menjadi lupa pada dirinya yang diliputi oleh unsur materi dan spiritual. Materi bersifat temporer, sementara spiritual merupakan unsur yang permanen.

Secara normatif masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah (2:282) di mana dijelaskan didalamnya apabila memiliki utang-piutang, baiknya dituliskanlah sesuai apa yang terjadi, tidak menambah-nambahkan atau mengurangi jumlah yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks ini, Akuntansi

Syariah sebenarnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi.

Konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi Akuntansi Syariah adalah diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu aspek Akuntansi Syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Pada gilirannya, bentuk praktik akuntansi syariah akan berbeda dengan akuntansi saat sekarang ini. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus tentang syariah islam. Ada 2 alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, dilihat dari semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Penggerak dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Diawali dengan Mit Ghamr, Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh Pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian Islamic Development Bank (1975), tetapi juga di Negara-Negara Eropa seperti Luxemburg (1978), Swiss (1981) dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi di Negara-Negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982 sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada 1 (satu) Bank Syariah dan 78

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Saat ini terdapat 11 bank umum syariah di Indonesia, namun hanya 4 bank umum yang memiliki modal inti berkisar 1 < 5 Triliun di mana hal tersebut mensyaratkan bank syariah bisa membuka jaringan kantor di wilayah yang telah diatur berdasarkan besaran kecukupan alokasi modal inti. Seiring dengan persoalan tersebut, produk-produk syariah cenderung kurang inovatif dan variatif. Produk syariah mengandung empat prinsip yaitu jual beli (murabahah, salam dan istishna'), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bitTamlik), dan akad pelengkap (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah).

Kualitas layanan dan kurangnya agresifitas pemasaran merupakan salah satu dari berbagai macam kendala dan persoalan di perbankan syariah di Indonesia. Inovasi produk belum seagresif di Malaysia karena perbankan syariah masih terkendala oleh minimnya SDM yang mumpuni dan menguasai produk syariah. Strategi pemasaran produk syariah yang kurang agresif dibandingkan bank konvensional dan mengedepankan metode tatap muka secara langsung masih menjadi kendala. Rendahnya jumlah penduduk Indonesia yang menjadi deposan di bank syariah juga tak lepas dari perbedaan cara pandang di antara sejumlah organisasi masa keislaman di Indonesia.

Data Bank Indonesia per September 2013 menunjukkan total aset perbankan syariah dan unit usaha syariah mencapai Rp 227,71 triliun, hanya tumbuh 16,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah masih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di balik banyaknya kendala tersebut, potensi perbankan syariah (di mana penerapan dari Akuntansi Syariah) Indonesia cukup berpeluang untuk bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Berdasarkan laporan tahunan *Global Islamic Finance Report 2013*, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah di dunia atau berada diperingkat kedua dibawah Malaysia untuk tingkat ASEAN.

Berbicara mengenai ASEAN, saat ini telah terbentuk ASEAN Economic Community (AEC), di mana pertama kali dibentuk pada tahun 2003. Pada KTT ASEAN ke -9 di Bali, Indonesia 2003, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang lebih nyata dan signifikan melalui pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) salah satunya dalam bidang ekonomi ASEAN *Economic Community* (AEC). Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada 31 Desember 2015.

AEC merupakan salah satu tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. AEC ini juga memiliki agenda di mana negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama ingin menjadikan ASEAN sebagai (Winantyo, 2008: 10):

1. Pasar dan basis produksi tunggal
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif
3. Wilayah pengembangan ekonomi yang merata
4. Daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antar negara ASEAN sebagai pasar tunggal dan dasar produksi tunggal meliputi area perdagangan bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antar negara ASEAN. Indonesia dengan kekayaan sumber dayanya diharapkan mampu bersaing di tingkat ASEAN, juga dapat melakukan penguatan perekonomian nasional dengan suatu sistem yang kini menurut penulis tidak lagi alternatif melainkan *mainstream* melalui penguatan ekonomi syariah.

Populasi masyarakat muslim yang tinggi dan ekonomi syariah yang terus berkembang diharapkan dapat meningkatkan pengembangan ekonomi nasional. Dengan penerapan ekonomi syariah ini diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional di tingkat ASEAN maupun dunia global. Para penggiat ekonomi syariah juga harus mengambil peran dalam menghadapi persaingan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia tidak boleh kalah

dalam bersaing, atau bahkan terjajah di negerinya sendiri karena dibanjiri produk-produk impor dengan kualitas yang tinggi. Salah satu tantangan terbesar perkembangan ekonomi syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah serta bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah itu sendiri

Indonesia akan bersaing ketat dengan negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam memasuki AEC 2016 karena ketiganya memiliki aset keuangan syariah yang besar dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, tantangan lain yang akan dihadapi lembaga keuangan Indonesia dalam AEC tahun 2016 menyangkut produk yang sesuai untuk pasar ASEAN, tingkat kesehatan perusahaan, efisiensi usaha, daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), serta kepentingan bisnis dan kepentingan nasional.

Konsep utama dari AEC yaitu menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di mana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi negara anggotanya, melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Maka, peningkatan market share menjadi sangat penting memasuki MEA tahun 2016.

Untuk mencapai semuanya itu, Indonesia harus mulai menyiapkan strategi apa yang akan dipakai agar mampu bersaing di pasar bebas nanti. Tentunya dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pribadi terutama bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan bagaimana ia menuntun masyarakat-masyarakatnya agar mampu bersaing pada pasar bebas dengan negara-negara asia lainnya. Dalam hal ini, strategi-strategi yang bisa digunakan seperti meningkatkan pemeriksaan ekspor-impor secara bersih, perlunya stabilitas politik, pemerintah jauh dari korupsi, atau perkembangan dari penerapan Akuntansi Syariah dalam hal ini pengukuran kinerja lembaga-lembaga keuangan di mana Indonesia sangat potensial untuk dapat mengembangkannya melihat jumlah masyarakat muslim di Indonesia mencapai 86,1% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah populasi dan penduduk muslim tersebut dapat dijadikan sebagai *captive market* atau nasabah potensial bagi perbankan syariah.

Perbankan syariah dapat tumbuh cepat dengan cara pemerintah juga harus mendukung. Pemberian insentif berupa keringanan perpajakan atau kewajiban penerbitan obligasi syariah bagi korporasi yang akan menerbitkan surat utang. Peluang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar dan Singapore untuk memajukan ekonomi syariah dapat berkembang dengan pesat di wilayah ini. Menurut data yang ada, total populasi di negara ASEAN adalah 600 juta jiwa dengan 40% diantaranya (sekitar 240 juta) adalah muslim. Hal ini merupakan indikator yang potensial untuk memperluas pangsa pasar bagi pertumbuhan keuangan syariah di kawasan ASEAN khususnya Indonesia. Dengan adanya strategi-strategi ini diharapkan pada tahun 2015 nanti Indonesia dapat mencapai tujuannya dalam persaingan pasar bebas di ASEAN Economic Community (Luhulima, 2015: 15).

Berikut beberapa alasan yang mendukung dan menunjukkan bank syariah di Indonesia lebih siap menyongsong MEA. *Pertama*, standar akuntansi syariah. Di Negara-negara Asean, hanya di Indonesia-lah yang mempunyai standar akuntansi syariah untuk bank syariah. Ini menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Di Malaysia pada awalnya mereka mempunyai standar akuntansi syariah, namun belum terlalu lengkap dan akhirnya malah dicabut. Bank syariah di Malaysia malah menggunakan standar akuntansi konvensional berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS). Hal ini juga terjadi di Singapura, Thailand dan Brunei, mereka tidak mempunyai standar akuntansi untuk bank syariah. Contoh yang menarik adalah CIMB Islamic Bank di Malaysia yang mempunyai Bank CIMB Niaga Syariah di Indonesia, mereka harus menyesuaikan akuntansi sesuai dengan PSAK syariah di Indonesia.

Kedua, risiko syariah. Yang dimaksud dengan risiko syariah disini adalah penerimaan produk syariah di suatu negara (Tariq, 2004). Beberapa skema produk perbankan syariah di Malaysia tidak diterima di Timur Tengah dan di Indonesia, misalnya *bay al innah* jual beli cicil kembali beberapa skema syariah lainnya. Ini menunjukkan skema produk bank syariah Indonesia mempunyai pangsa pasar yang luas di Asean, namun tidak berlaku bagi Malaysia ke Indonesia. Hal yang serupa juga diadopsi di Brunei, sedangkan perbankan syariah di Singapura dan Thailand relatif lebih berhati-hati dalam menge-uarkan produknya.

Sementara itu hal yang perlu diperhatikan bahwa aset pendapatan bank syariah terbesar di Indonesia sebesar 5,4 US dollar, dan belum mampu masuk ke dalam 25 jajaran aset bank syariah terbesar di dunia, sementara itu tiga bank syariah Malaysia masuk ke dalam daftar. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah dengan bank syariah Malaysia yang akan menjadi competitor utama. Dengan Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien.

Aspek lain yang menjadi kekurangan yakni diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri perbankan syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga 'maqasid syariah'. Hal ini berbeda dengan negara lain yang peranan produk-produk di sektor keuangan (pasar uang dan pasar modal) lebih dominan. Kekurangan instrumen di pasar keuangan syariah tersebut berdampak pada pengelolaan likuiditas perbankan syariah.

Kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi kuota SDI dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Perlu disadari bahwa salah satu butir kesepakatan dalam MEA 2015 adalah "*freedom of movement for skilled and talented labour*"s. Hal ini merupakan tantangan yang serius, mengingat Sarjana dan dan SDM syariah Indonesia yang mayoritas masih minim pengalaman, dan kurangnya *hard skill* maupun *soft skill*.

Selain itu masih minimnya pusat pelatihan dan riset terkait perbankan syariah baik formal maupun nonformal juga menjadi kendala, padahal untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, penguasaan ilmu dan teori tidaklah cukup, karena harus diimbangi dengan keahlian dan keterampilan yang langsung dapat diimplementasikan atau dengan kata lain sarjana dan calon tenaga kerja harus sudah siap dan memiliki sertifikasi untuk langsung bisa dipakai jasanya. Maka daripada itu perlu adanya restrukturisasi dari sisi sistem dan kelembagaan baik dari Pemerintah maupun lembaga Pendidikan untuk lebih mengarahkan SDA yang ada kepada penguasaan IPTEK dan bahasa, serta lebih memperbanyak melakukan pelatihan dan riset baik dalam lingkup regional maupun dengan lembaga maupun asosiasi lain baik skala nasional maupun internasional.

Penutup

Dalam Islam, struktur dan agen seperti halnya masyarakat dan individu yang pada dasarnya rill, saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam realitasnya akuntan (agen) terlihat begitu tenggelam dalam belenggu kapitalisme, sehingga teori *agency* berupa konflik kepentingan, kelihatannya bergeser dengan bersimbiosis secara mutual antara kepentingan manajemen dan akuntan. Begitupun halnya asumsi “independensi” kelihatannya justru menjadikan akuntan sebagai “patung” yang diam atas segala penindasan yang terjadi, bukan menjadikan independen sebagai sarana keadaulatan akuntan. Sehingga semakin menjadi bukti betapa krisis akuntan berupa krisis kepercayaan semakin tergerus.

Oleh karenanya akuntan harus dikembalikan *khittah*-nya sebagai profesi yang berdaulat, ia adalah ideolog sebagai *Rausyan Fikr*. Sebab pada dasarnya sifat pencatatan Tuhan “dinisbahkan” kepada akuntan di bumi ini. Akuntan adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dipersepsi sebagai utusan Tuhan untuk memberi kabar kebenaran. Selaras hal tersebut berarti pada dasarnya akuntan seharusnya menjadi perwakilan yang tertindas di dalam masyarakat ekonomi, yang dalam posisi tersebut berperan untuk memberi kepastian terpenuhinya hak-hak *stakeholders* secara adil sesuai ketentuan Tuhan tentang hal tersebut.

Inilah bentuk ke-*khusuk*-an akuntan dalam beribadah, bertasbih dengan “angka” dalam artian menjadikan segenap tugas sebagai tugas-tugas (risalah) “kenabian” untuk memetakan hak para *stakeholders* dengan adil dan benar. Hal ini hanya dapat berlangsung dalam bingkai keberdaulatan dan membangkitkan kesadaran Ketuhanan (*khusuk*) dengan menempatkan Tuhan sebagai arah puncak pertanggung jawaban. Di samping itu akuntan syariah mensejahterakan menjadi bagian dalam ekonomi syari’ah.

Kesiapan para akuntan syariah Indonesia memasuki MEA 2016 dengan menyiapkan *pertama*, standar akuntansi syariah. Di Negara-negara Asean, hanya di Indonesia-lah yang mempunyai standar akuntansi syariah untuk bank syariah. Ini menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain. *Kedua*, Akuntan syariah harus memahami risiko syariah. Yang dimaksud dengan risiko syariah disini adalah penerimaan produk

syariah di suatu negara yang berhubungan dengan teknik pembuatan laporan keuangan. Ketiga menyiapkan kekurangan instrumen di pasar keuangan syariah tersebut berdampak pada pengelolaan likuiditas perbankan syariah di Indonesia sehingga membutuhkan kompetensi akuntan syariah dalam lembaga keuangan syariah. Keempat upaya untuk memenuhi kuota SDI khususnya akuntan syariah dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Kelima, profesi akuntan syariah yang memiliki kemampuan IPTEK.

Daftar Pustaka

- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Cromwell Press Ltd.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*. Jakarta: Gema Insani.
- Core Indonesia, 2016, *Membidik Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jakarta: Core Publish
- Departemen Perdagangan RI. TT. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta: TP
- Hafidudin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publising.
- Harahap, 2007. *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Krishnakumar, S., and C. P. Neck. 2002. "The "what", "why", and "how" of spirituality in the workplace", *Journal of Managerial Psychology*. Vol. 17 No. 3.
- Lidigdo, Unti. 2007. *Paradox Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Luhulima, CPF. Dewi Fortuna Anwar. 2015. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPF
- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. Menggagas Teori Akuntansi Syari'ah. *Seminar Akuntansi Syari'ah*. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi,

- Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 24 Nopember 2007.
- Mulawarman. 2008 menegaskan bahwa dalam akuntan khususnya dalam pelaksanaan auditing, telah terjadi mutualisme eksklusif kepentingan dalam kerangka *the third party*. Akuntan ikut tenggelam dalam relasi kepentingan *agent-principall* akibat terkalahkannya dalam kuasa *agent-principall*. Lihat: <http://www.ajidedim.com>.
- Mulawarman. <https://ajidedim.wordpress.com/2008/03/21/rekonstruksi-independensi-akuntan-publik-bagian-1/> diakses 15 September 2016 pukul 12.30.
- Muthahhari. 2008. *Manusia Dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagad Raya (ter.)*. Jakarta: Lentera
- R. Winantyo, Rahmat Dwi Saputra dkk. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Editor: Syamsul Arifin. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Secretariat, ASEAN. 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Publication, Jakarta. <http://www.asean.org> akses 5 September 2016 pukul 06.30.
- Sulistiyo, A. B.. 2004. "Komitmen profesi dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara etika kerja Islami dan sikap terhadap perubahan organisasi". *Tesis Magister*. Undip, Semarang
- Syariati. 1984. *Tugas Cendekiawan Muslim (terj.)*. Jakarta: CV. Rajawali
- Tim Biro Hub. & Studi Inter-Bank Ind. 2008. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*. Edisi Satu. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yulius. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 4, No. 2, Nopember 2002